

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM *SURETY* TERHADAP PENCAIRAN
JAMINAN PELAKSANAAN DENGAN SKEMA PENJAMINAN KONTRA
BANK GARANSI PADA PERJANJIAN PENGADAAN KAPAL MILIK
PEMERINTAH**



OLEH :

IRENA HAPSARI, S.H.

NIM. 031814253022

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM *SURETY* TERHADAP PENCAIRAN JAMINAN
PELAKSANAAN DENGAN SKEMA PENJAMINAN KONTRA BANK GARANSI
PADA PERJANJIAN PENGADAAN KAPAL MILIK PEMERINTAH**

TESIS

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh:

IRENA HAPSARI, S.H.

NIM. 031814253022

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 20 Oktober 2022

Dosen Pembimbing Utama:


Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
NIP. 196101271986011003

Dosen Pembimbing Kedua:


Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198402172006041001

Mengetahui:
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga


Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
pada tanggal 20 Oktober 2022**

TIM PENGUJI TESIS:

**Ketua : Dr. Ghansham Anand, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198401052014041003**

**Anggota : 1. Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
NIP. 196101271986011003**

**2. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198402172006041001**

**3. Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H.
NIP. 196010301987012001**

**4. Erni Agustin, S.H., LL.M.
NIP. 198308102006042001**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irena Hapsari, S.H.

NIM : 031814253022

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 20 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



Irena Hapsari, S.H.

NIM. 031814253022

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(QS. Al-Insyirah : 6)

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Perlindungan Hukum *Surety* terhadap Pencairan Jaminan Pelaksanaan dengan Skema Kontra Bank Garansi pada Perjanjian Pengadaan Kapal Milik Pemerintah” dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu : (1) Hubungan Hukum Para Pihak dalam Penjaminan Kontra Bank Garansi pada Perjanjian Pengadaan Kapal Milik Pemerintah; (2) Perlindungan Hukum *Surety* terhadap Pencairan Jaminan Pelaksanaan dengan Skema Kontra Bank Garansi pada Perjanjian Pengadaan Kapal Milik Pemerintah. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan metode penelitian hukum normatif. Disamping itu, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada skema kontra bank garansi dimana pada skema tersebut pada prinsipnya Perusahaan Asuransi (*Surety*) menjamin Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank, sehingga pada Kontra bank garansi terjadi hubungan hukum antara kontraktor, bank penerbit bank garansi dan Perusahaan Asuransi (*Surety*). Ikutsertanya Perusahaan Asuransi (*Surety*) dalam kontra bank garansi tidak terikat hubungan hukum dengan Pemilik Proyek.

Dengan tidak dibayarnya hak perusahaan asuransi, terjadi wanprestasi. Perlindungan hukum preventif sebagai tindakan pencegahan tidak berlanjut melalui gugat ke pengadilan, dengan cara memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, dan jika penyelesaian dengan cara ini tidak membawa hasil ditindaklanjuti penyelesaian secara represif menggugat penyedia jasa/kontraktor atas dasar wanprestasi sebagaimana Pasal 1243 B.W.

Kata Kunci : Kontra Bank Garansi, Jaminan Pelaksanaan, Pengadaan Barang/Jasa.

ABSTRACT

This thesis is entitled "Surety Legal Protection against Disbursement of Implementation Guarantee with Counter Bank Guarantee Scheme in Government-Owned Ship Procurement Agreement" with 2 (two) main issues, namely: (1) Legal Relations of the Parties in Guaranteeing Counter Bank Guarantee in Government-Owned Ship Procurement Agreement ; (2) Surety's Legal Protection against the Disbursement of Performance Guarantee with the Counter Bank Guarantee Scheme in the Government-Owned Ship Procurement Agreement. This research is a type of legal research with normative legal research methods. In addition, this study uses a statutory approach and a conceptual approach.

The results of this study indicate that in the contra bank guarantee scheme where in the scheme in principle the Insurance Company (Surety) guarantees Bank Guarantees issued by the Bank, so that in the Contra bank guarantee there is a legal relationship between the contractor, the bank issuing the bank guarantee and the Insurance Company (Surety). . The participation of the Insurance Company (Surety) in a bank guarantee contract is not bound by any legal relationship with the Project Owner.

By not paying the insurance company's rights, a default occurs. Preventive legal protection as a preventive measure does not continue through lawsuits to court, by complying with the provisions in Law Number 1 of 2016 concerning Guarantees and Financial Services Authority Regulation Number: 2/POJK.05/2017 concerning the Implementation of Guarantee Agency Business, and if the settlement in this way does not bring results, it is followed up with a repressive settlement of suing the service provider/contractor on the basis of default as referred to in Article 1243 B.W.

Keywords: *Counter Bank Guarantee; Performance Guarantee; Procurement of Goods/Services.*

KATA PENGANTAR

Mengucap syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Surety Terhadap Pencairan Jaminan Pelaksanaan Dengan Skema Kontra Bank Garansi Pada Perjanjian Pengadaan Kapal Milik Pemerintah” dapat terselesaikan tepat waktu. Tujuan penulisan Tesis Ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga.

Begitu banyak pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.
3. Bapak Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama tesis penulis yang dengan kesabarannya meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan akademis serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II tesis penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan akademis serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.H., LL.M., Ibu Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H. serta Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M. selaku Panitia Penguji tesis penulis yang berkenan memberikan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tesis ini.
6. Seluruh dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang berkenan membagi ilmu, wawasan dan pengalamannya.
7. Seluruh staff akademik Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu dan memberikan kelancaran dalam proses administrasi penyusunan tesis ini.
8. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Djoko Santoso dan Ibunda Eko Rahayu Hariningsih, yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, dukungan baik moril maupun materiil, nasihat dan doa hingga terselesaikannya penyusunan tesis ini.
9. Suami Penulis, Hadyan Hutomo, S.H. dan putra penulis, Kaisar Althario Hutomo yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doa sehingga penulis dapat menyusun Tesis ini tepat waktu.
10. Kakak, Adik dan Keluarga besar penulis, yang telah mendukung serta kasih sayang yang tak pernah putus kepada penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan sehingga penulis dapat setiap waktu membalas kebaikan dan membanggakan keluarga.
11. Sahabat perkuliahan, Khilaima Faillafah, S.H., M.Kn., Syaukah Az-Zahro, S.H., M.Kn., Fransisca Utami Masakke, S.H., M.Kn., Sofa Azammushadah, S.H., M.Kn., RR Asfarina Izazi Razan, S.H., M.Kn., Aprillaili Aya Tri Kartini, S.H., M.Kn., Riski Pebru Ariyanti, S.H., M.Kn., dan By Dwi Wahyu Agustina, S.H., yang selalu memberikan pembelajaran dan nasehat dalam perkuliahan. Semoga selalu diberikan kesehatan sehingga dapat selalu berkumpul bersama.

12. Teman-teman Magister Kenotariatan angkatan 2018 kelas malam yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Terima kasih atas semangat, perhatian, canda tawa dan bantuannya selama perkuliahan dan semua pihak mulai dari teman dan saudara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna dengan segala keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Tesis ini. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberi manfaat bagi pembacanya, terutama bagi penulis serta dapat menginspirasi semua pihak terlebih untuk penulis selanjutnya. Pada akhir kata pengantar ini penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

Surabaya, 20 Oktober 2022
Penulis,

Irena Hapsari, S.H.
NIM. 031814253022

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembar Negara Tahun 1959 Nomor 75)

Burgerlijk Wetboek (B.W), *Staatblad* Nomor 23 Tahun 1847

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembar Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Nomor 3472)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembar Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembar Negara Nomor 5835)

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 Tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 747)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 Tentang
Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan

Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tanggal 18 Maret
1991 Tentang Pemberian Garansi Oleh Bank

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR Tanggal 18
Maret 1991 Tentang Pemberian Garansi Oleh Bank

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Skema Hubungan Hukum dalam Bank Garansi

Tabel 2.2. Skema Hubungan Hukum dalam Surety Bond

Tabel 2.3. Skema Hubungan Hukum dalam Kontra Bank Garansi

Tabel 3.2. Penyelesaian Klaim pada Skema Kontra Bank Garansi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PANITIA PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS TESIS.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Keaslian Penelitian.....	12
1.6. Metode Penelitian.....	16
1. Tipe Penelitian.....	16
2. Pendekatan Masalah.....	16
3. Sumber Bahan Hukum	17
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika.....	20
BAB II : HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PENJAMINAN KONTRA BANK GARANSI PADA PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA MILIK PEMERINTAH.....	22
2.1. Dasar Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Pengadaan Kapal)	22

2.2. Bank Garansi sebagai Bentuk Jaminan.....	36
2.3. Surety Bond sebagai Bentuk Jaminan.....	41
2.4. Kontra Bank Garansi sebagai Bentuk Alternatif Penjaminan	47
BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM <i>SURETY</i> TERHADAP PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN DENGAN SKEMA PENJAMINAN KONTRA BANK GARANSI PADA PERJANJIAN PENGADAAN KAPAL MILIK PEMERINTAH.....	51
3.1. Kontra Bank Garansi sebagai Modifikasi Produk Turunan dari Surety Bond.....	51
3.2. Berakhirnya Jaminan Pelaksanaan dalam Bentuk Kontra Bank Garansi.....	63
BAB IV : PENUTUP.....	79
4.1. Kesimpulan	79
4.2. Saran.....	81
DAFTAR BACAAN	